

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Revenge porn merupakan tindakan melawan hukum berupa penyebaran gambar berbau seksual yang disebar tanpa izin dari salah satu pihak yang tujuannya untuk membalas dendam dan merusak hidup korban. Penyebabnya adalah pelaku menginginkan sesuatu dari korban, tetapi tidak diberikan oleh korban dan sebagai akibatnya konten seksual milik korban disebar oleh pelaku sebagai bentuk balas dendam pelaku kepada korban. Oleh karena itu, untuk melindungi korban kekerasan seksual berupa *revenge porn* dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi mereka dari segala aspek, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terciptanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban kekerasan seksual. Draf Undang-Undang ini telah diusulkan sejak tahun 2012 dan baru masuk ke prolegnas tahun 2016 dan disahkan pada tahun 2022. Undang-Undang ini diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia seperti bebas dari penyiksaan, tindakan kekerasan, atau tindakan yang dapat menyebabkan rendahnya derajat manusia.

Kesimpulan dalam jawaban analisis rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual berupa *revenge porn*, Undang-Undang ini telah mencantumkannya di dalam Pasal 67 ayat 1 yang mengatakan bahwa korban kekerasan seksual berupa *revenge porn* diberikan hak berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak korban wajib diberikan dan difasilitasi oleh negara.

2. Karena *revenge porn* terjadi di dunia maya, maka pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memulihkan korban dari trauma atas peristiwa ini juga diperlukan. Pemberian hak pribadi untuk hidup dengan tenang dan hak untuk dilupakan berupa penghapusan konten porno juga harus diberikan dan wajib difasilitasi oleh negara. Pemberlakuan 2 (dua) undang-undang ini harus mendahulukan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) daripada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.2 Saran

1. Pemberian hak korban seharusnya bisa langsung diberikan tanpa adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, contohnya adalah keinginan bunuh diri dari dalam diri korban karena rasa traumanya yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021). hlm. 49

JURNAL

Ekawati, N. K. dkk. 2012. *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*. 10 (2). 86.

Christianto, Hwian. *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mimbar Hukum (Vol. 32 Nomor 2) Juni 2020, hlm. 176.

Kenedi, John. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. hlm. 46.

Munir, Abdul dan Wulan Junaini. *Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/6382/3023/>.

Piliang, Yasraf Amir. (2012). *Masyarakat Informatif dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*. Jurnal Sositeknologi. Hal 145.

Taufiki, Muhammad dan Hakimah. *Dinamika Pandangan Ahli Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. (Vol. 4, No. 1). hlm. 51

Setiabudhi, I Ketut Rai. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Desa (Vol. 9 Nomor 5) hlm 4.

Sugiyanto, Okamaisya. *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*. Jurnal Wanita dan Keluarga (Vol. 2 no. 1). hlm. 23.

WEBSITE

Akurat. *Berujung BUI, Ini 5 Kasus Revenge Porn yang Pernah Terjadi di Indonesia*.

<https://akurat.co/berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-di-indonesia>.

BBC Indonesia. 2021. *Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar – “Saya berkali-kali mencoba bunuh diri”*

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

CXO Media. *Revenge Porn: Kejahatan Siber yang Harus Dihindari*.

<https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220615150154-55-175228/revenge-porn-kejahatan-siber-yang-harus-diwaspadai>.

CNN Indonesia. *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>.

Direct Message Twitter.

Geotimes. *Revenge Porn dan Kampanye “Stop Texting” yang Membahayakan*.

<https://geotimes.id/opini/revenge-porn-dan-kampanye-stop-sexting-yang-membahayakan/>

Kemenko PMK. *Percepatan Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS*.

<https://www.kemenkopmk.go.id/percepatan-penyusunan-aturan-turunan-u-u-tpks>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Apa itu kekerasan seksual?*.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>

Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-de-tail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

- Kompas. *Penting Untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual*.
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>.
- Kompas. *Kekerasan Seksual Sering Tidak Ditangani karena Aparat Beri Stigma kepada Korban*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/13192021/kekerasan-seksual-1-sering-tidak-ditangani-karena-aparat-beri-stigma-kepada>. A
- Kompas. *Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>.
- Kompas. *Mengenal Apa Itu UU TPKS*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengenal-apa-itu-uu-tpks?page=all>.
- LBH Semarang. 2020. *Mengenal Revenge Porn, Salah Satu Bentuk Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya*.
<https://www.lbhsemarang.id/news/mengenal-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925>. Minggu, 21 November 2021.
- Legal Service India. *Revenge Pornography*.
<https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2179-revenge-pornography.html>.
- Legal Voice, *Know Your Rights: Nonconsensual Pornography (“Revenge Porn”)*,
<https://www.legalvoice.org/nonconsensual-pornography>
- Liputan6. *5 Istilah Pelecehan Seksual di Internet yang Perlu Dipahami Agar Tak Jadi Korban*,
<https://www.liputan6.com/global/read/4685484/5-istilah-pelecehan-seksual-di-internet-yang-perlu-dipahami-agar-tak-jadi-korban>
- NIST. *cyberspace*. <https://csrc.nist.gov/glossary/term/cyberspace>.
- Peran Perempuan. *Revenge Porn: Beware of What You Share*.
<https://peranperempuan.id/revenge-porn-beware-of-what-you-share/>.
- RAINN. *Sexual Assault*. <https://www.rainn.org/articles/sexual-assault>.

- Republika. *Waspadai Sextortion, Ancaman Siber Incar Remaja*.
<https://www.republika.co.id/berita/pliugd366/waspadai-sextortion-ancaman-siber-incar-remaja>.
- SWGfl. *Research reveals gendered trends in revenge porn crimes*.
<https://swgfl.org.uk/magazine/revenge-porn-research-2019/>.
- Tempo. *Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*.
<https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>
- Tirto. 2019. “*Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi dan Tidak Terlindungi*”. Senin, 29 November 2021.
<https://tirto.id/nelangsa-korban-revenge-porn-diobjektifikasi-tak-terlindungi-dfka>.
- Universitas Islam Indonesia. 2020. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Masih Minim*.
<https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>
- Universitas Padjajaran. 2021. *Kasus Jual-Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum*.
<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum>. Senin, 25 Oktober 2021.
- Utama Andri, *Materi Pelengkap Modul (Bahan Ajar) Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli, Pengenalan Teknologi Informasi*.

SUMBER HUKUM PRIMER

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Hal. 1

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan Nomor 153/PID.SUS/2020/PN PKB, hlm. 13

Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Nomor 423/PID.SUS/2021/PT MKS, hlm. 7